

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS HASIL  
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA  
(Studi Pada Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK)**

**Disusun Oleh:  
Amrulia Arwin**

**Dosen Pembimbing:  
Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak., CSRS., CA.  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang**

*ABSTRACT*

*This study aims to examine the effect of auditors' educational level, professional certification, experience, training hour, age and gender on the quality of financial audit result. The research is administered at the Auditorat Utama Keuangan Negara I of the Indonesian Audit Board. The data are collected from 45 audit team members selected through purposive sampling technique and analyzed using multiple linier regression method by means of SPSS Statistics 17. The result of the study shows that two of the variables, i.e. professional certification and training hours, affect the quality of the financial audit result; meanwhile, the other variables do not give any effect upon the audit result.*

**Keywords:** *Quality of financial audit result; Educational level; Professional certification; Experience; Training hours; Age; Gender*

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, pengalaman, jam pelatihan, usia, dan jenis kelamin pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini dilaksanakan pada Auditorat Utama Keuangan Negara I BPK RI dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 45 tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik regresi linier berganda dengan alat uji SPSS Statistics 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara yaitu sertifikasi profesional dan jam pelatihan pemeriksa. Sedangkan variabel tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan jenis kelamin pemeriksa tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan negara.

Kata kunci: Kualitas hasil pemeriksaan, tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, pengalaman, jam pelatihan, usia, jenis kelamin.

## PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana diamanatkan dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan oleh BPK menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit tersebut menjadi dasar pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia apabila terdapat indikasi korupsi dan pidana. Oleh karenanya semakin baik kualitas hasil pemeriksaan berarti membantu meningkatkan pemerintahan yang baik.

Hasil audit berupa temuan audit ini menentukan kualitas audit yang dilaksanakan, semakin banyak temuan berarti semakin bagus kualitas audit yang dilaksanakan. Kompetensi auditor memiliki beberapa faktor yang menentukan misalnya tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, pengalaman, jam pelatihan, usia, dan jenis kelamin auditor.

### **Keuangan Negara**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Keuangan negara dilihat dari pendekatan sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Seluruh proses pengelolaan keuangan negara itu wajib dilaksanakan sebaik baiknya demi kesejahteraan negara.

Demi terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Langkah nyata dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

### **Pemeriksaan Keuangan Negara**

Pengertian Pemeriksaan Keuangan Negara atau Audit Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional

berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang dalam rangka pemeriksaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) namun bisa juga BPK melimpahkan pemeriksaan keuangan negara ini kepada akuntan publik.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat tiga jenis pemeriksaan keuangan negara, yaitu:

1. **Pemeriksaan Laporan Keuangan**  
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. **Pemeriksaan Kinerja**  
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.
3. **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**  
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan khusus selain pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), reвью (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agrees-upon procedures*). Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

### **Temuan Audit**

Rai (2008) mendefinisikan temuan audit sebagai masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit berlangsung dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit karena mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja dalam hal ekonomi, efisiensi dan efektivitas entitas yang diaudit. Temuan audit biasanya berupa tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, tindakan yang dilarang atau tercela, sistem yang tidak memuaskan, eksposur-eksposur risiko yang harus dipertimbangkan. Temuan yang baik memiliki beberapa sifat diantaranya yaitu temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai, temuan audit harus penting (material), serta temuan audit harus mengandung unsur temuan (kondisi, kriteria, dan sebab akibat).

### **Kualitas Hasil Pemeriksaan**

Kualitas audit seperti dikatakan oleh De Angelo (1981) dalam Alim dkk. (2007), yaitu sebagai probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Sedangkan Christiawan (2002) mengungkapkan, kualitas audit ditentukan oleh

dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Dari definisi di atas, maka kesimpulannya adalah auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang berani mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jelas terlihat bahwa independensi dan kompetensi seperti dikatakan Christiawan (2002) merupakan faktor penentu kualitas audit dilihat dari sisi auditor.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) karena bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara variabel independen (variabel tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, pengalaman, jam pelatihan, usia, dan jenis kelamin auditor) dengan variabel dependen (kualitas hasil pemeriksaan). *Hypothesis testing* adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tim pemeriksaan pada Auditama Keuangan Negara I selama tahun 2014 dan 2015 dengan sampel penelitian sejumlah empat puluh lima tim pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama tahun 2014 dan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan rincian sebagai berikut; data jumlah temuan pemeriksaan didapat dari IHPS pada semester yang terkait dengan penelitian, data terkait auditor berupa tingkat pendidikan, sertifikasi profesional, pengalaman, usia, dan jenis kelamin auditor didapatkan dari database kepegawaian dari satuan kerja terkait yang disusun berdasarkan database kepegawaian dari Biro Sumber Daya Manusia BPK, sedangkan jam pelatihan didapatkan dari Biro Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK.

## HASIL

Dari pengolahan 45 data awal diketahui bahwa ada satu data yang *outlier* yang memiliki nilai yang jauh berbeda dengan data lainnya sehingga bisa membuat analisa menjadi bias dan mengurangi ketepatan analisa, oleh karenanya data dari pemeriksaan ini dikeluarkan dari proses analisa lebih lanjut sehingga data yang diolah hanya menjadi 44 data pemeriksaan.

Hasil statistik deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FIND	44	4	17	7.86	3.310
EDU	44	.00	.50	.2199	.19026
CER	44	.00	.75	.2694	.22823
EXP	44	6.70	17.60	9.9535	2.59115
TRAIN	44	29.00	97.00	53.0247	16.12740
AGE	44	30.50	43.60	35.5221	2.72212
GENDER	44	.00	.75	.3525	.21307

### 1. Temuan Audit

Rata-rata jumlah temuan pemeriksaan pada PDTT AKN I untuk tahun 2014 dan 2015 adalah 7,86 temuan dengan temuan paling rendah sejumlah 4 temuan dan temuan paling banyak sejumlah 17 temuan.

### 2. Pendidikan Auditor

Variabel pendidikan diukur menggunakan variabel dummy dengan memberikan angka 1 untuk auditor yang mempunyai tingkat pendidikan pascasarjana atau lebih dari itu dan angka 0 untuk auditor yang mempunyai tingkat pendidikan dibawah pascasarjana. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan Tim Pemeriksa adalah 0,2. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata dalam tim pemeriksaan terdapat 20% auditor dengan tingkat pendidikan pascasarjana. Nilai minimal tingkat pendidikan yaitu 0 berarti dalam satu tim pemeriksaan tidak ada auditor yang pendidikannya pascasarjana dan nilai maksimalnya 0,5.

### 3. Sertifikat Profesional

Variabel sertifikat profesional diukur menggunakan variabel dummy dengan memberikan angka 1 untuk auditor yang mempunyai sertifikasi akuntan (Ak) dan angka 0 untuk auditor yang tidak mempunyai sertifikasi akuntan. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata sertifikat profesional Tim Pemeriksa adalah 0,27. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata dalam tim pemeriksaan terdapat 27% auditor yang bersertifikat akuntan profesional. Nilai minimal sertifikat profesional yaitu 0 berarti dalam satu tim pemeriksaan tidak ada auditor bersertifikat akuntan profesional dan nilai maksimalnya 0,75.

### 4. Pengalaman

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata pengalaman Tim Pemeriksa adalah 10. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pengalaman auditor dalam tim

pemeriksaan adalah 10 tahun. Nilai minimal pengalaman yaitu 6,7 tahun dan nilai maksimalnya 17,6 tahun.

### 5. Jam Pelatihan

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata jam pelatihan Tim Pemeriksa adalah 53. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata jam pelatihan auditor dalam tim pemeriksaan adalah 53 jam dalam satu tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jam pelatihan rata-rata auditor pada AKN I telah sesuai dengan Panduan Manajemen Pemeriksaan dimana setiap pemeriksa diharuskan mengikuti pelatihan setidaknya 80 jam dalam dua tahun atau 40 jam dalam setahun. Nilai minimal jam pelatihan yaitu 29 jam dan nilai maksimalnya 97 jam.

### 6. Usia

Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata pengalaman Tim Pemeriksa adalah 35,5. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata usia auditor dalam tim pemeriksaan adalah 35,5 tahun. Nilai minimal usia yaitu 30,5 tahun dan nilai maksimalnya 43,6 tahun.

### 7. Jenis Kelamin

Variabel jenis kelamin diukur menggunakan variabel dummy dengan memberikan angka 1 untuk auditor berjenis kelamin perempuan dan angka 0 untuk auditor berjenis kelamin laki-laki. Dari tabel 4.1 diketahui bahwa rata-rata jenis kelamin Tim Pemeriksa adalah 0,35. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata dalam tim pemeriksaan terdapat 35% auditor yang berjenis kelamin perempuan. Nilai minimal jenis kelamin yaitu 0 berarti dalam satu tim pemeriksaan tidak ada auditor berjenis kelamin perempuan dan nilai maksimalnya 0,75.

### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan *output* pengolahan, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah 0,547 hal ini berarti variabel dependen (jumlah temuan) dijelaskan sebesar 54,7% dari pengaruh variabel independen yang diteliti (pendidikan, sertifikasi profesional, pengalaman, jam pelatihan, usia dan jenis kelamin auditor) sedangkan sisanya sebesar 45,3% dipengaruhi variabel independen lainnya.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.781 <sup>a</sup>	.610	.547	2.229	1.779

Seluruh variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikan lebih kecil dari (0,05). Nilai signifikan lebih kecil dari (0,000 < 0,05), berarti seluruh variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	287.375	6	47.896	9.641	.000 <sup>a</sup>
	Residual	183.807	37	4.968		
	Total	471.182	43			

Hasil pengujian menunjukkan variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pada dua faktor yaitu variabel sertifikat profesional dan jam pelatihan auditor dengan nilai signifikan 0,002 dan 0,000. Sedangkan variabel independen lain yang diteliti tidak memiliki pengaruh signifikan, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yaitu tingkat pendidikan auditor (0,280), pengalaman auditor (0,432), usia auditor (0,275) dan jenis kelamin auditor (0.803)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.560	7.514		1.139	.262
	EDU_X1	-2.334	2.128	-.134	-1.096	.280
	CER_X2	6.016	1.801	.415	3.341	.002
	EXP_X3	.249	.314	.195	.794	.432
	TRAIN_X4	.133	.025	.649	5.287	.000
	AGE_X5	-.324	.292	-.266	-1.107	.275
	GENDER_X6	.429	1.702	.028	.252	.803

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya adalah faktor yang memengaruhi kualitas pemeriksaan negara yaitu sertifikat profesional dan jam pelatihan pemeriksa. Penelitian ini tidak menemukan pengaruh dari tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan jenis kelamin pemeriksa terhadap kualitas pemeriksaan negara.

### Keterbatasan Penelitian

1. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan dan kendala diantaranya yaitu:
2. Penelitian hanya menggunakan variabel independen terkait karakteristik pemeriksa padahal terdapat variabel lain yang juga memengaruhi misalnya karakteristik *auditee*.
3. Terdapat beberapa data di sistem yang tidak diupdate sehingga membuat kerancuan karena data sistem dan data dari sumber lain berbeda.

4. Jumlah data yang diolah dalam penelitian tidak bisa maksimal karena masih banyak data terkait pemeriksaan yang masih dalam proses pelaporan atau verifikasi.
5. Data yang ditarik dari sistem tidak mencakup keseluruhan data yang diperlukan untuk penelitian sehingga peneliti harus mencari data secara manual untuk melengkapi kekurangan data.

#### **Saran Penelitian**

1. Dalam penelitian selanjutnya agar memperhitungkan variabel independen terkait karakteristik auditee sehingga dapat menggambarkan kualitas hasil pemeriksaan lebih baik karena menilai kualitas hasil pemeriksaan dari dua sisi. Penambahan atau penggantian variabel-variabel yang lain akan membuat hasil penelitian yang lebih bervariasi.
2. Kendala perbedaan data dalam penelitian ini adalah data dalam rencana kerja pemeriksaan yang berbeda dengan data realisasi pemeriksaan tahun berjalan yang ada dalam sistem, kendala ini dapat dihilangkan atau dikurangi pada penelitian selanjutnya dengan melakukan konfirmasi dengan satker terkait obyek penelitian karena biasanya meskipun data dalam sistem belum diperbarui namun perubahan data selalu tercatat dalam dokumen pada satker terkait.
3. Dalam penelitian selanjutnya agar lebih maksimal dalam pengambilan datanya harus mengambil cakupan data dalam IHPS yang lebih banyak, karena bisa jadi data hasil pemeriksaan yang diteliti baru termuat dalam IHPS beberapa semester setelah pemeriksaan dilaksanakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, Pandhit Seno. 2009. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Ditinjau dari Persepsi Auditor atas Independensi, Pengalaman, dan Akuntabilitas. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto
- Alim dkk. 2007. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. SNA X. Makasar.
- Arens, A.A. dan Loebbecke, 2012. *Modern Auditing*, Jakarta: Salemba Empat
- Asih, 2006. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dibidang Auditing di Kantor Akuntan Publik (KAP) Propinsi Jawa Barat. Tesis S2 Program Pascasarjana UI, Jakarta.
- Batubara, Rizal Iskandar. 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan dan Independensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris pada Bawasko Medan). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

- Cheng, et al. 2013. *Direct and Mediating Effects of Auditor Quality on Auditor Size and Performance*. *International Business Research*; Oktober
- Christiawan, Yulius Jogi. 2002. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 4. No. 2. pp. 79-92.
- De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality*. *Journal of Accounting and Economics*. December. P 183 - 186.
- Deis, D.R. dan Groux, G.A. 1992. *Determinants of Audit Quality in The Public Sector*, *The Accounting Review*. Januari. p. 462-479.
- Effendy, Muh. Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Gorda. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Denpasar : Widya Kriya Gematama
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Herliansyah, Yudhi. Meifida Ilyas. 2006. *Jurnal*. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment. SNA IX. Padang
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- International Auditing and Assurance Standards Board. 2011. *Audit Quality an IAASB Perspective*, New York.
- Januarti, Indira dan Rr. Sabrina K. 2012. Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika, dan Gender terhadap Ketepatan Pemberian Opini Auditor melalui Skeptisisme Profesional Auditor (Studi Kasus Pada KAP Big Four di Jakarta). Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV. IAI. Banjarmasin. Hal 9 – 22.
- Juniansyah, Ivan. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung). *Skripsi*. Program Sarjana S1 Universitas Brawijaya.
- Jusuf, Haryono. 2001. *Auditing*, Jogjakarta : STIE YKPN

- Meyers-Levy, Joan (1986), "Gender Differences in Information Processing: A Selectivity Interpretation," *unpublished doctoral dissertation*, Marketing Department, Northwestern University, Evanston, IL.
- Mulyadi. 2002. *Auditing* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahmawan, Airlangga Zaky. 2016. Pengaruh Kualitas Auditor dan Karakteristik Auditee Terhadap Temuan dan Opini Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2013-2014. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Universitas Indonesia.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep Praktik Studi Kasus*. Penerbit: Salemba Empat.
- Salsabila, Ainia. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Audit, dan Gender terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal (Studi Empiris pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Skripsi*. Program Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia
- Sekaran, Uma dan Bougie, R. 2010. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Chichester: Wiley.
- Setyaningrum, Dyah. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK RI. Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV. IAI. Banjarmasin.
- Tuanakota, Theodorus M. 2011. *Berpikir Kritis dalam Auditing*, Jakarta: Salemba Empat
- Widiarta, 2013. Pengaruh Gender, Umur, dan Kompleksitas Tugas Auditor pada Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Bali. *Skripsi*. Program Sarjana S1 Universitas Udayana.
- Widiastuty, Erna dan Rahmat Febrianto. 2010. Pengukuran Kualitas Audit : Sebuah Esai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol 5 No. 2 Juli. Hal 1-36.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/K/I-XIII.2/2/2008 Tahun 2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan tanggal 19 Februari 2008.

- \_\_\_\_\_, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tanggal 7 Maret 2007.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 tanggal 23 Mei 2012.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Agustus 1999.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 Nopember 2001.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tanggal 28 April 2003.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tanggal 14 Januari 2004.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara tanggal 19 Juli 2004.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuanga tanggal 30 Oktober 2006.